

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA TELUK
KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Sastra Satu Program Studi
Administrasi Negara*



OLEH

ANNISA FADHILA

NPM. 210411013

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2025

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENATAAN REKLAME DI
KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NAMA : ANNISA FADHILA
NPM : 210411013
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : Juli
Tahun : 2025

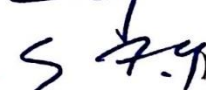
Tim Penguji

KETUA


DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

SEKRETARIS


EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

1. **RIKA RAMADHANTI, SIP., M.Si** (Pembimbing I) ()
2. **SARJAN M, S.Sos., M.Si** (Anggota Penguji I) ()
3. **SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si** (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Annisa Fadhila
NPM : 210411013
Program Studi : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Alamat : Kelurahan Sungai Jering LK 1, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan cara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Teluk Kuantan, 15 Mei 2025



Fadhila
NPM. 210411013

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2286)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tanggap waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Bagaskara Putra-Hindia)

Ayo berkembang lebih jauh, lebih indah lagi, lebih ceria lagi. You've been great for getting this far, don't let irresponsible people hurt u! Someday you are brighter than the star. Just be strong, just be brave, and be sure. Yes you can!!

I'm so proud of me. You did well.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak Syamsurizal dan Ibu Efriyani yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu abang, kakak dan keponakan yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril atau material. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernahberhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

By : Annisa Fadhila

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr . Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Reklame Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”***. Penulisan ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Administrasi Negara Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis mengucapkan kepada pihak yang telah membantu penulis memperoleh masukan-masukan untuk menulis penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan-kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis ini menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi,M.Pdi.**, selaku Rektor Universitaas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing I yang dengan sepenuh dedikasi telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, doa, dan ilmu yang baru, serta telah bersedia meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing II yang juga telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan arahan, saran, kritik, masukan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda **Syamsurizal** dan pintu Surgaku Ibunda **Efriyani**. Terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua ku yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan dan cinta kasih yang tidak terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembaran kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan, Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mama bahagia. Tetap selalu doakan dan memberikan restu disetiap langkah kecil dari putri kecil yang telah beranjak dewasa ini.
5. Teruntuk kakak dan abang saya terima kasih yang selalu memberikan dukungan, semangat yang luar biasa sekaligus menjaga mental dan kebahagiaan ku selama perjalanan lika liku pembuatan skripsi ini.
6. Kepada teman seperjuangan yang telah bersama dari awal perkuliahan, **Yuyun Melda Yanti**. Terima kasih telah melewati banyak hal bersama penulis, mulai dari perkuliahan, magang, hingga bimbingan skripsi yang turut membantu banyak hal.
7. Kepada teman-teman saya **Maura, Afifah fandri, Yetra, Yolanda** terima kasih telah menjadi saudara dan sahabat terbaik bagi peneliti

yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

8. To someone special who accompanied me during the writing of this and was part of this process.
9. *Last but not least, **Annisa Fadhila***. Ya, diri saya sendiri untuk mengapresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah diambil. Terima kasih untuk tetap waras dan bertahan sejauh ini. Berjanjilah untuk dapat mengangkat derajat keluarga dan semoga apa yang selama ini diimpikan dan terus mencapai setiap tujuan yang diinginkan.

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis dimana akan datang semoga akan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Teluk Kuantan, 15 Mei 2025

Annisa Fadhila

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

ANNISA FADHILA

NPM. 210411013

Permasalahan yang terjadi di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu masih banyak dalam pemasangan reklame yang masih banyak tidak sesuai dengan tempat yang sudah semestinya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dimana pemasangan reklame di Kota Teluk Kuantan tersebut tidak diperbolehkan jika pemasangan berada di pertikungan jalan atau mengganggu pengguna jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penataan reklame di kota Teluk Kuantan. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan reklame di kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dengan kurang baik, dikarenakan masih terdapat reklame yang tidak beizin atau kebanyakan jangka waktu pemasangan telah lewat dari yang ditentukan.

Kata Kunci: Kebijakan, Reklame

ABSTRACT

Implementation Of Local Government Policy in Advertising Arrangement in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency

By :

ANNISA FADHILA

NPM. 210411013

The problem that occurs in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency is that there are still many advertisements that are not in accordance with the appropriate place according to the Kuantan Singingi Regency Regional Regulation, where the installation of advertisements in Teluk Kuantan City is not allowed if the installation is at a road corner or interferes with road users. The purpose of this study was to determine the local government policy in arranging advertisements in Teluk Kuantan City. The method used is the Descriptive Qualitative method. Data collection techniques are obtained from the results of observations, interviews, and documentation. Data analysis uses data collection steps, data analysis and drawing conclusions. The results of this study show that the implementation of local government policies in the arrangement of advertisements in Teluk Kuantan City, Kuantan Singingi Regency has been running well, but there are still advertisements that do not have permits or do not pay taxes because most of the installation period has passed the specified period.

Keywords: Policy, Advertising

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	
Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH	
..... Error! Bookmark not defined.	
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
KERANGKA TEORITIS	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	7
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik	9
2.1.3 Teori/Konsep Implementasi	14
2.1.4 Teori/Konsep Penataan Reklame	17
2.1.5 Teori/Konsep Tata Ruang Kota	21
2.2 Kerangka Pemikiran	23
2.3 Hipotesis Penelitian.....	24

2.4 Definisi Operasional	24
2.4.1 Komunikasi	25
2.4.2 Sumber Daya	25
2.4.3 Struktur Birokrasi	26
2.4.4 Penertiban/Pengawasan	27
2.5 Konsep Variabel	28
BAB III	29
METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Informan Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian	30
3.3.1 Data Primer	30
3.3.2 Data Sekunder.....	30
3.4 Fokus Penelitian	31
3.5 Lokasi Penelitian	31
3.6 Metode Pengumpulan Data	31
3.6.1 Wawancara	32
3.6.2 Observasi	32
3.6.3 Dokumentasi	33
3.7 Metode Analisis Data.....	33
3.7.1 Pengumpulan data	33
3.7.2 Analisis Data	33
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	34
3.8 Jadwal Penelitian	35
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
4.1 Sejarah Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2 Gambaran Umum Satpol PP	Error! Bookmark not defined.

4.2.1 Visi	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Misi	Error! Bookmark not defined.
4.3 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Error! Bookmark not defined.
4.4 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah	Error! Bookmark not defined.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Identitas Informan	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Informan Berdasarkan Umur	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5.2.1. Komunikasi	Error! Bookmark not defined.
5.2.2. Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
5.2.3. Struktur Birokrasi	Error! Bookmark not defined.
5.2.4. Penertiban/Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
5.3 Pembahasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	36
PENUTUP	36
6.1. Kesimpulan	36
6.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 : Konsep Variabel Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	28
Tabel III.1 : Informan Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	29
Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Implementasi Penelitian Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	35
Tabel IV.1 : Jumlah Data Reklame Tahunan Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023	39
Tabel IV.2 : Data Shop Sign Tidak Berizin dan Tidak Membayar Pajak Tahun 2023	42
Tabel IV.3 : Data Baliho Tidak Berizin dan Tidak Membayar Pajak Tahun 2023	43
Tabel V.1.1: Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel V.1.2 : Identifikasi Responden Berdasarkan Umur	50
Tabel V.1.3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel V.3.1 : Jumlah Reklame dan Pendapatan Reklame di Kota Teluk Kuantan Tahun 2023.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	23
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya tak lepas dari keberadaan reklame atau iklan luar ruang. Reklame menjadi sasaran komunikasi yang efektif bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat luas. Di kota-kota besar, pemasangan reklame bukan hanya sarana iklan semata, melainkan juga bagian penting dalam menghidupkan ekonomi daerah. Kota Teluk Kuantan, sebagai pusat administrasi dan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi. Aktivitas pemasangan reklame yang cukup tinggi di kota ini menimbulkan kebutuhan akan penataan yang efektif agar keberadaannya tidak mengganggu ketertiban kota.

Iklan dan reklame merupakan dua bentuk media promosi yang berbeda dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meski memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan kepada khalayak, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi media, jangkauan, maupun efektivitasnya. Reklame adalah media promosi yang waktu tayangnya telah ditentukan dan biasanya berbentuk fisik dan dipasang di ruang-ruang publik, seperti baliho, spanduk, atau neon box. Pesan yang disampaikan melalui reklame bersifat statis atau satu arah, tanpa adanya interaksi dengan audiens. Sementara itu, iklan di media sosial merupakan bentuk promosi digital yang diputar berulang-ulang tanpa adanya batas waktu tayang. Iklan ini hadir dalam

berbagai bentuk seperti gambar, video pendek, atau stories yang disebarakan melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, dan Tiktok.

Reklame merupakan salah satu objek pajak daerah menurut hukum (undang-undang). Meningkatnya aktivitas pemasangan reklame merupakan salah satu potensi bagi Pemda Kuantan Singingi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari penataan reklame masih banyak yang menyalahi aturan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi mengakibatkan penataan dan keindahan tidak terlihat.

Pemasangan reklame disuatu perkotaan yang mengandung pesan komersial mendominasi pandangan, bahkan sering mengalahkan bentuk bangunan serta mengganggu keasrian lingkungan sekitarnya. Bentuk dan bangunan yang mengisi ruang kota terbentuk oleh tatanan masa. Aneka ragam reklame yang terpampang menciptakan kesemrawutan dan ketidakaturan sosial, kondisi ini menyebabkan informasi sulit ditangkap karena saling tumpang tindihnya reklame tersebut.

Pada peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011, untuk menciptakan kenyamanan lingkungan, keasrian, dan tata letak bangunan, estetika serta keamanan perlu dilakukan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berupaya untuk mengatur

pemasangan reklame dengan mengeluarkan berbagai regulasi seperti peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup), yang mengatur standar pemasangan, tempat pemasangan, serta pajak dan retribusi yang dikenakan terhadap reklame, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat umum dalam menikmati lingkungan kota yang bersih dan tertib.

Namun, kebijakan penataan reklame di kota Teluk Kuantan masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang kerap ditemui antara lain adalah kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah terhadap aturan yang berlaku, pengawasan dan penertiban yang belum optimal. Disamping itu, masih terdapat reklame yang dipasang secara ilegal, penempatan yang berada di tempat-tempat zonasi atau tanpa izin resmi, atau tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan kesan yang mengganggu estetika kota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan penataan reklame yang belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain permasalahan dengan penataan reklame, aspek lainnya seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aspek ini juga menjadi perhatian penting. PAD dari pajak dan retribusi reklame dapat menjadi salah satu sumber pemasukan yang signifikan bagi Kabupaten Kuansing, yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan kota. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak reklame dan adanya reklame ilegal menyebabkan potensi penerimaan daerah dari sektor ini belum dimaksimalkan.

Di Kota Teluk Kuantan masih banyak reklame yang tidak sesuai dengan tempat yang sudah semestinya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing, yang dimana pemasangan reklame di Kota Teluk Kuantan tersebut tidak diperbolehkan jika pemasangan tersebut di pertikungan jalan atau mengganggu pengguna jalan. Salah satu lokasi nya berada di Jl. Proklamasi, Sungai jering.

Menurut Perbup Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 pasal 12 ayat (4) “Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut”. Tetapi pada Perbup Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (2) apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut yang akan wajib pajak. Dalam Peraturan Daerah Kuansing Pasal 13 “Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen)”.

Kebijakan pemerintah dalam penataan reklame menjadi sangat krusial untuk menciptakan keseimbangan antara aspek estetika kota, kenyamanan masyarakat, dan potensi penerimaan pendapatan daerah. Di kota Teluk Kuantan, upaya penataan reklame telah diatur dalam berbagai kebijakan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Misalnya penempatan reklame yang tidak sesuai dengan aturan zonasi, kurangnya penegakkan hukum terhadap reklame ilegal, serta ketidakseimbangan antara jumlah reklame yang terpasang dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi terhadap kebijakan penataan reklame yang telah diterapkan di Kota Teluk Kuantan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diungkapkan pada Latar Belakang maka penulis dalam penelitian akan merumuskan masalah adalah sebagai berikut : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kebijakan yang berlaku terkait dengan penataan reklame di Kota Teluk Kuantan, termasuk peraturan perizinan, Zonasi, dan ketentuan teknis lainnya. Untuk memahami kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebutuhan tata ruang kota dan aspek estetika.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan teoritis terhadap penulis dan dapat dijadikan sebagai landasan (titik tolak) untuk penelitian berikutnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti mengenai tata aturan pemasangan reklame yang dilakukan oleh dinas terkait di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya izin penyelenggaraan iklan media ruang terbuka.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan memenuhi. Jadi administrasi ialah suatu fenomena sosial, dan hidup subur di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di dalam tingkat kehidupan demikian individu mempunyai peranan penting karena sebenarnya publik ialah bentuk kehidupan antar individu dalam suatu sistem, untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu setiap individu berfungsi sebagai sumber daya publik, sekaligus sumber daya administrasi.

Secara umum, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Sumber lain mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat, sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar.

Pasolong (2016:8) administrasi negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. (Muhammad 2019:1)

Administrasi adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Administrasi Publik adalah cabang administrasi yang khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sektor publik. Administrasi publik melibatkan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Administrasi publik berfokus pada aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Amane et al., 2021:1)

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hirarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama. Di tingkat bawah adalah fungsi fungsi pengawas.

Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah diterapkan. (Siti Marwiyah, 2020 : 2).

Menurut Soewarno (dalam Siti Marwiyah, 2020:1) administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk tujuan.

Menurut Mashall Edward Dimock dan Gladys Ogden Dimock (dalam Mufiz, 2015: 12-13) menyatakan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek kegiatan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang mempengaruhi kebijakan publik, dalam pengertian proses administrasi publik adalah segala langkah yang dilakukakn untuk menyelesaikan suatu pekerjaan adminitrasi publik dalam arti bidang kompetensi penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan kerja manusia pada lembaga publik.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberikan batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata “policy”. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang

dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan merupakan bentuk keputusan atau langkah yang diambil oleh pihak berwewenang atau pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan suatu aktivitas, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan biasanya dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kepentingan bersama. Dalam proses pembuatannya, kebijakan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, masalah yang ada, dan sumber daya yang tersedia.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip oleh Dewi et al (2022:13) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta, hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (dalam Siti Marwiyah, 2022:12).

Menurut Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh Purwanto (2019:75) kebijakan adalah seperangkat yang diambil oleh pelaku-pelaku dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan.

Menurut Aderson sebagaimana dikutip oleh Purwanto (2019:77) yang menyebutkan, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Thomas Dye dalam Aruni et al (2023:5) bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kemudian kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah dan kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo. Menurut Thomas Dye tersebut ialah semua kebijakan publik merupakan kebijakan yang jelas dibuat oleh pemerintahan dan bukan dibuat oleh pihak swasta. Kemudian dalam menghadapi suatu permasalahan publik, jika pemerintah merasa harus membuat kebijakan publik terbaru atau tetap dengan kebijakan yang sudah ada. Hal tersebut dinyatakan sebagai suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Aruni et al (2023:5) kebijakan publik mengandung bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah itu sendiri.

Kebijakan publik selain pada hakekatnya merupakan hasil yang ditetapkan oleh pemerintahan, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai hasil kebijakan tersebut merupakan pengaruh dari aktor dan faktor dari kawasan luar pemerintahan. Bisa jadi merupakan suatu usulan atau isu-isu dari pihak swasta yang kemudian pemerintah pada akhirnya harus menetapkan sebuah kebijakan.

Menurut Carl Freadrich yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (dalam Pramono Joko, 2022:30).

Dalam kaitannya dengan definisi tersebut perhatiannya maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.

- c. Kebijakan publik merupakan apa aja yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

B.W Hogwood dan L.A Gunn dalam Aruni et al (2023:6) hakekatnya kebijakan publik mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau beberapa pernyataan yang ingin dicapai
- b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dicapai

- c. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah
- d. Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan
- e. Keluaran (output) yaitu apa yang nyata yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu
- f. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif panjang

Maka dapat diartikan dari uraian diatas kebijakan publik merupakan suatu bentuk kewenangan secara formal yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan isu-isu yang menjadi permasalahan publik. kemudian jika dirasa perlu maka diambil langkah penetapan suatu kebijakan dari adanya suatu kasus, isu, dan hal-hal yang dianggap penting bagi pemerintahan sebagai pengambil kebijakan.

Menurut Edi Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara berencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (B. Sore, 2017:3). Sedangkan menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2015:2), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu “*to implement*”. dalam kamus “*to implement*” yang artinya menyediakan sarana

bagi pelaksanaan sesuatu dan “*to partical effect*” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa perundang-undangan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan (Siti Marwiyah, 2022 : 36).

Menurut Marcella dan Wiley 2003 dalam Kertati Indra et a l (2023) Implementasi kebijakan didefinisikan secara luas sebagai operasional dari tujuan yang diharapkan dan memulihkan setiap kesenjangan yang ditemukan sehubungan dengan lingkungan, teknologi, proses, atau orang-orang organisasi, sebagai langkah maju untuk membangun kepatuhan.

Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sakti syahputra et al., 2023).

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan atau pelaksanaan keputusan pemerintah atau organisasi yang sudah dirumuskan dalam bentuk peraturan, strategi, atau program. Secara umum, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang esensial setelah kebijakan dirumuskan, karena tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan berdampak nyata pada kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan yang ingin terbaiki.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai tujuan (Ulfa & Mashur, 2022).

Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. (Syahrudin, 2019)

Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kebijakan melalui rencana, kegiatan, atau tindakan dalam suatu sistem tertentu (Mustanir et al., 2022).

Daniel A. Mazmainan dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Pramono Joko (2020) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan dalam arti hasil penilaiannya dapat dari sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang dikembangkan dalam sebuah artikel Siregar dan Suri (2018) yang dirangkum menjadi empat indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Struktur Birokrasi
4. Penertiban

2.1.4 Teori/Konsep Penataan Reklame

Penataan berasal dari kata tata. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pengertian Penataan tata artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya. Seperti memindahkan bebatuan yang mengganggu dalam penggalian pasir, penataan dengan penanaman pohon dijenjang akhir penambangan sebagai upaya dari revegetasi.

Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji barang, jasa, ataupun untuk

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau badan yang diselenggarakan/ ditempatkan agar dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum. Pengetahuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu reklame dan kaitannya dengan periklanan, yakni memahami arti dari iklan reklame yang dipasang di berbagai tempat.

Pemasangan reklame pada satu sisi dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, meningkatkan kualitas kota secara visual, serta memberikan akses informasi. Namun, apabila terlalu banyak dan tidak teratur, keberadaannya dapat menghalangi pandangan ke arah elemen-elemen kota yang menarik dan dapat mengancam keselamatan penduduk. Penataan berasal dari kata tata. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian penataan artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya.

Penataan reklame saat ini lebih mengutamakan keseimbangan estetika kota, keamanan, dan fungsi iklan dalam konteks lingkungan perkotaan. Beberapa prinsip penataan reklame :

1. Penempatan

Penempatan reklame harus mempertimbangkan sudut pandang visual dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Reklame juga harus ditempatkan di zonasi yang tidak membahayakan masyarakat sekitar, misalnya reklame tidak diizinkan penempatannya di jalan yang bertikungan.

2. Ukuran dan ketinggian

Ukuran reklame disesuaikan dengan kecepatan rata-rata di jalan agar mudah terlihat oleh pengendara dan pejalan kaki. Ukuran tersebut biasanya sekitar 2-24 meter persegi untuk reklame diluar bangunan.

3. Pencahayaan dan konstruksi

Reklame bercahaya harus mempertimbangkan pencahayaan eksternal untuk menghindari gangguan bagi pengguna jalan. Sedangkan untuk konstruksi perlu kokoh dan tahan lama, dengan bahan seperti baja tahan karat untuk keamanan, terutama di area yang berangin tinggi atau dekat dengan keramaian.

4. Tipologi reklame

Jenis reklame yang populer diantaranya Billboard, Neonbox, Wallscape, dan spanduk. Masing-masing dari reklame tersebut memiliki aturan pemasangan tersendiri agar sesuai dengan konteks urban dan kebutuhan informasi atau estetika kota.

Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam pemasaran suatu produk/jasa. Namun dalam perkembangannya reklame juga banyak digunakan dikalangan pemerintahan untuk sebagai media informasi publik. Keberadaan reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan reklame tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan media yang digunakan.

Bagi seorang pengusaha reklame sangatlah penting untuk sebagai media promosi barang produk atau jasa. Tentu saja sebelum pemasangan sebuah reklame harus memiliki perizinan ke pihak yang berwenang dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah yang berlaku.

Beberapa objek reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis untuk dipasang atau digantungkan pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya.
2. Reklame Megatron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa sebuah program iklan dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
4. Reklame Melekat (sticker) adalah sebuah reklame yang berbentuk lembaran kertas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
5. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

2.1.5 Teori/Konsep Tata Ruang Kota

Tata ruang kota adalah upaya strategis dalam merancang, mengatur, dan memanfaatkan lahan di wilayah perkotaan untuk menciptakan ruang yang nyaman, fungsional, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, tata ruang tidak hanya berfokus pada pengaturan fisik seperti bangunan, jalan, dan taman, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyertainya. Sebuah kota yang dirancang dengan baik adalah hasil proses perencanaan yang matang, di mana kebutuhan masyarakat saat ini dipertimbangkan tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Tata ruang dapat diartikan susunan ruang yang teratur. Teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan. Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang.

Pembangunan tata ruang merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan suatu negara. Walaupun Indonesia memiliki keragaman geografis, demografis, dan sosial yang memperumit implementasi kebijakan tata ruang secara efektif, pembangunan tata ruang harus terus

berjalan. Kerumitan dalam proses pembangunan dan implementasi kebijakan tata ruang ini sering kali menjadi tantangan yang kompleks dalam konteks perkembangan global maupun lokal (Andani :2022)

Pembangunan tata ruang kota merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan suatu negara (Priyanta, 2015). Walaupun Indonesia memiliki keragaman geografis, demografis, dan sosial yang memperumit implementasi kebijakan tata ruang kota secara efektif, pembangunan tata ruang kota harus terus berjalan. Kerumitan dalam proses pembangunan dan implementasi kebijakan tata ruang sering kali menjadi tantangan yang kompleks dalam konteks perkembangan global maupun lokal.

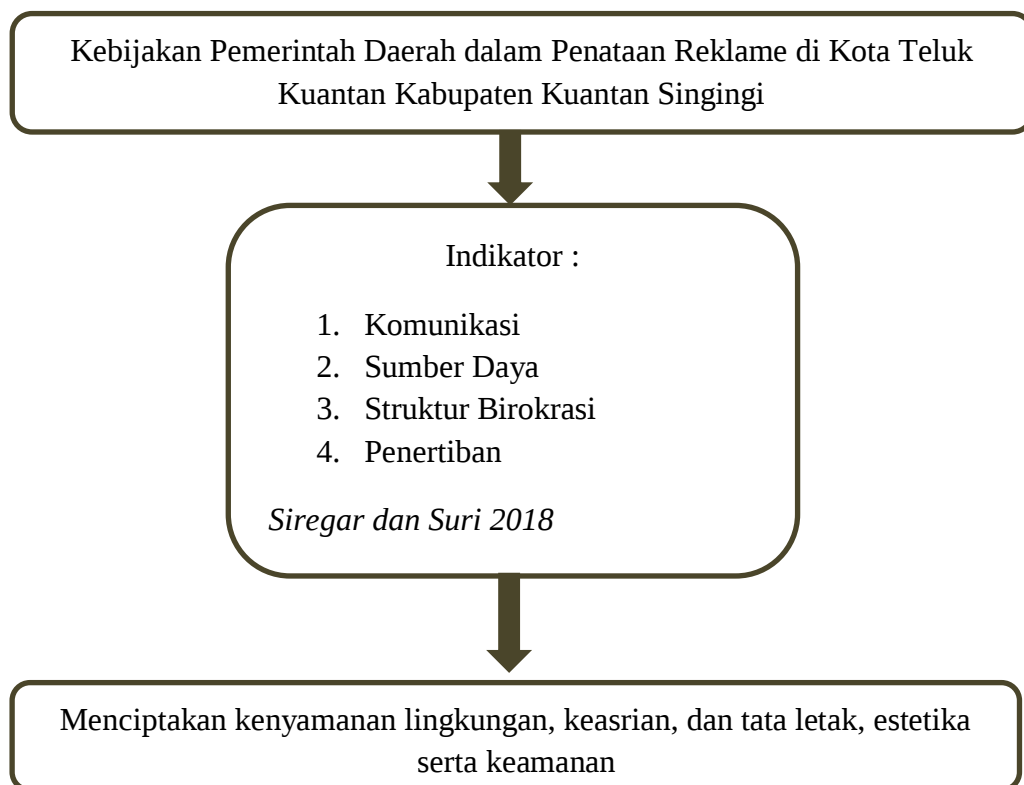
Tata Ruang, dan Penataan Ruang. Sebuah kata dengan daya tarik ajaib tidak saja bagi para arsitek abad ke duapuluh, namun sudah mewabah dikalangan para pakar dan masyarakat, sebuah kata yang begitu sering digunakan dan sekaligus disalahgunakan. Kata itu digunakan sebagai ‘alpha’ dan ‘omega’-nya arsitektur (Cornelis Van de Ven, 1991, dalam Anindya, 2015).

Tatanan pada hakekatnya lebih dari sekedar ruang, namun merupakan konsep di mana religi dan ritual adalah sentral, manusia dan ruang selaras membentuk kesatuan dan penataan didasarkan pada hal-hal yang bersifat ritual. Di sisi lain merupakan suatu proses yang memberi ciri pada jaman, yang secara filosofi merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan dan berdimensi masa lampau, masa kini, dan masa datang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ssapto Haryoko (dalam Sugiyono, 2017:66), “kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel yang diteliti”.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi



2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:70), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas disini, maka penulis dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu “diduga bahwa di Kota Teluk kuantan Kabupaten Kuansing yang dimana dalam penataan reklame masih banyak yang tidak sesuai dengan tempat yang sudah semestinya”.

2.4 Definisi Operasional

Menurut Bambang Prasetyo dan lina Miftahul Jannah (2016:90), “Definisi Operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel”.

Untuk memudahkan menganalisa dan menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep serta menghilangkan rasa salah pengertian dan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang dapat dilihat sebagai berikut:

2.4.1 Komunikasi

Secara umum, komunikasi diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian informasi bisa berupa pesan, gagasan dan ide bersumber dari salah satu pihak yang ditujukan untuk pihak lainnya. Biasanya komunikasi dilakukan melalui dua cara, yakni secara verbal dan nonverbal. Poin terpentingnya adalah pesan tersebut dapat sampai ke pihak yang diberikan pesan tersebut.

Komunikasi memegang peran strategis dalam keberhasilan sebuah kebijakan penataan reklame. Sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Komunikasi berfungsi untuk memastikan setiap informasi tersampaikan dengan jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Dalam konteks penataan reklame, komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian dialog yang konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini akan tercapai ketika semua pihak merasa dilibatkan dan di hargai dalam prosesnya.

2.4.2 Sumber Daya

Sumber daya adalah elemen Krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan penataan reklame. Kebijakan yang dirancang dengan baik membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam konteks penataan reklame, sumber daya menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah membutuhkan

tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang tata ruang, design visual, hingga regulasi hukum terkait reklame. Selain itu petugas lapangan yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat berinteraksi secara profesional dengan masyarakat dan pelaku usaha reklame. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para petugas ini menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan benar. Sumber daya yang memadai tidak hanya memperkuat pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kota yang tertata, indah, dan nyaman bagi semua pihak.

2.4.3 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah kerangka organisasi yang mengatur hubungankerja, alur tugas, dan tanggung jawab di dalam suatu sistem pemerintahan atau institusi. Struktur birokrasi sering kali memiliki sifat formal dan kaku dengan aturan dan prosedur yang terstandarisasi. Selain itu, struktur birokrasi juga memainkan peran penting dalam akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap individu atau unit dalam birokrasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Struktur birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan penataan reklame. Dalam penataan reklame, struktur birokrasi yang ideal adalah yang memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas disetiap tingkatan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, setiap instansi pemerintah harus mengetahui

peran dan tanggung jawabnya. Koordinasi antar instansi menjadi kunci dalam struktur birokrasi ini, tanpa koordinasi yang baik kebijakan dapat berjalan tumpang tindih atau bahkan terhambat.

2.4.4 Penertiban/Pengawasan

Penertiban adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa aturan, peraturan, atau kebijakan yang ada di suatu wilayah atau lingkungan dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban reklame ini mencakup berbagai aspek :

1. Penghapusan Reklame Ilegal
2. Penataan Lokasi Pemasangan
3. Penertiban Reklame Kedaluwarsa

Pengawasan adalah suatu proses yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan reklame mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Monitoring Izin Reklame
2. Penerapan Pajak Reklame
3. Kepatuhan Terhadap Standar Teknis dan Estetika

2.5 Konsep Variabel

Tabel II. 1 : Konsep Variabel Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Judul	Indikator	Sub Indikator	Ket
1.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	a. Komunikasi	a. Memberikan informasi pada pemasangan reklame mengenai sanksi. b. Memberikan informasi lokasi strategis sesuai untuk pemasangan reklame	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
		b. Sumber Daya	a. Menyediakan personil yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan b. Kerjasama dinas – dinas untuk penertiban reklame	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
		c. Struktur Birokrasi	a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan b. Memberikan sanksi	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
		d. Penertiban	a. Penertiban reklame ilegal b. Pencatatan dan dokumentasi	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

Sumber : (Siregar dan Suri 2018) tentang kebijakan penataan reklame

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau budaya yang di kaji. Dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.

Tabel III.1 Informan Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	1	Informan
2	Dinas Pendapatan Daerah	1	Informan
3	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	10	Informan
Jumlah		12	

Sumber : Modifikasi Penulis 2024

Dalam menentukan jumlah (orang) di informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sumpling*. Menurut Usman dan Akbar (2014:45), “purposive sumpling

yaitu teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya”. Dimana akan memudahkan peneliti karena yang dijadikan anggota sampelnya hanya yang engetahui tentang kebijakan pemerintah daerah dalam penataan reklame.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri atas beberapa data yang diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah deskriptif, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi 2, yaitu :

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan peneliti sejak pertama memulai penelitian dan tidak menggunakan perantara. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data ini dilakukan dengan tujuan agar pertanyaan peneliti terjawab, dan peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara secara langsung dengan informan untuk mendapatkan jawaban yang terkait dengan judul penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan daari berbagai sumber secara tidak langsung atau peneliti sebagai tangan kedua, yaitu melalui perantara, dalam hal ini data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, publikasi, gambar dari media massa, undang-undang, atau peraturan dan data lain yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara dari para informan yang bersedia diwawancarai mengenai pelaksanaan kebijakan dalam penataan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih konsisten dan terarah. Untuk dapat memahami lebih luas dan mendalam, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kebijakan dalam penataan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi serta hal yang menjadi faktor penghambat dalam penataan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih Kabupaten Kuantan Singingi ini sebagai lokasi penelitian karena masih banyaknya reklame yang terpasang tidak sesuai regulasi yang berlaku.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah

dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian.

Dalam penelitian ada beberapa jenis pengumpulan data yaitu :

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian, karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka. Namun demikian teknik wawancara ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi lainnya, misalnya telepon dan internet. (Bagong Suyanto & Sutinah, 2022 : 69)

Dengan melakukan wawancara, peneliti mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang diinginkan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan melalui tatap muka antara peneliti dengan narasumber. Sebagai peneliti saat melakukan mewawancarai seorang narasumber tetap membuat beberapa daftar pertanyaan sebagai pedoman dan wawancara disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu.

3.6.2 Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku

subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga memberikan data tambahan hasil wawancara.

3.6.3 Dokumentasi

Dalam penelitian ini berupa foto-fotopenelitian yang diambil saat pengambilan data berlangsung. Foto-foto tersebut berisikan aktivitas peneliti maupun informan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Aktivitas yang dimaksud terutama mengenai interaksi yang dilakukan di lingkungan sosialnya dengan menggunakan kamera ataupun smartphone.

Tujuan dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mendukung kelancaran penelitian, menyimpan bukti penelitian, mendukung transparansi dan akuntabilitas.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti melakukan wawancara terhadap para informan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini.

3.7.2 Analisis Data

Analisis data adalah proses kritis dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan, pengelolaan, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan peneliti, menguji hipotesis atau mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Melalui analisis data

peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan antarvariabel, tren, dan hasil-hasil yang relevan untuk mencapai tujuan

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Dalam kegiatan analisis data selanjutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kemudian mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat peraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Setelah menyimpulkan hasil penelitian dari data yang telah didapatkan peneliti melakukan verifikasi dengan cara melihat ataupun kembali mendiskusikannya. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian lebih valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Implementasi Penelitian Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

**Tabel Jadwal Penelitian
Tahun 2024-2025**

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024-2025																			
		Okb/Nov				Des/Jan				Feb/Mar				Apr/Mei				Jun/Jul			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Pembuatan Proposal		■	■	■																
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
4	Ujian Proposal								■												
5	Revisi Proposal									■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
7	Ujian Skripsi																			■	
8	Revisi Skripsi																				■

Sumber : Modifikasi Penulis 2024

BAB VI

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Reklame Di Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam penataan reklame telah berjalan dengan kurang baik, dikarenakan masih banyak reklame yang tidak beizin atau tidak membayar pajak dikarenakan kebanyakan jangka waktu pemasangan telah lewat dari yang ditentukan.

6.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Pemerintah daerah khususnya Satpol-PP diharapkan untuk perlu menambah jumlah personel atau petugas untuk mendukung proses pengawasan dan penertiban di lapangan.
2. Koordinasi antarinstansi dalam struktur birokrasi perlu diperkuat lagi, salah satunya penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses perizinan serta pelaporan reklame ilegal.

3. Sebaiknya dalam pengawasan dan penertiban dilakukan secara berkala, konsisten, dan tegas terhadap pelanggaran, agar terciptanya efek jera serta menjaga estetika dan ketertiban kota.
4. Perlu diterapkan mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang terintegrasi dan berbasis digital, agar proses perizinan lebih efisien, mengurangi praktik percaloan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
5. Pemerintah daerah yang terkait dalam teknis disarankan untuk membentuk tim monitoring terpadu yang hanya melakukan pengawasan khusus secara berkala dan sistematis terhadap seluruh titik pemasangan reklame, guna mencegah terjadinya pelanggaran berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amane et al., 2021. *Reformasi Administrasi Publik*. Aureka Medika Aksara. Jawa Tengah.
- Aruni Fidhia et al., 2023. *Politik & Kebijakan Publik*. Ruang Karya. Kalimantan Selatan
- Asiva, Noor Rachmayani. 2015. *Ragam Analisis Data Penelitian*. Madura : IAIN Madura.
- Khosim, K. 2020. *Metodologi Penelitian Dasar*. Semarang: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Kertati, Indra et al., 2023. *Implementasi Kebijakan Publik (dari Hulu ke Kiri)*. Kota Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik*. Probolinggo : Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Mufiz, Ali, 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Modul UT)*. Banten: Universitas Terbuka.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press. Sulawesi.
- Naziratulmuna. 2023. *Representasi penataan dan penempatan reklame di kota banda aceh*. Banda Aceh : Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Purwanto, Jarot Hidayat. 2019. *Pemimpin dan Implementasi Kebijakan Publik*. Alqaprint. Jatinagor
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press. Kota Surakarta.
- Saktisyahputra, S., Evitha, Y., Novita Sari, S., Suprayitno, D., & Irrianda, J. (2023). Digital Communication Management Government of the Republic of Indonesia for Inclusive and Sustainable Economic Recovery in Indonesia. KnE Social Sciences.
- Siregar Wildasari, Dia Meirina Suri. 2018. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pentaan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 Hal. 176-190 (2018).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabet.

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung : Nusa Media.

Tresiana, Novita; Duadji, Noverman. 2018. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung : Cendekia Press.

